

STRATEGI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DENGAN SINGAPURA

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

MUHAMAD FAJAR SYAMSUL PUTRA

2110852033



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

ABSTRAK

Reklamasi pantai Singapura sejak tahun 2015 hingga 2022 memicu ketegangan terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi pergeseran garis pangkal yang mengancam ruang laut serta mata pencaharian komunitas pesisir, sehingga menempatkan isu ini sebagai persoalan strategis nasional Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga integritas teritorial, kepastian hukum maritim, serta mitigasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi akibat reklamasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura pada tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *smart power* yaitu gabungan *hard power* dan *soft power* oleh Joseph S. Nye, Jr. *Hard power* merupakan kemampuan sebuah negara untuk memengaruhi negara lain melalui paksaan, baik dalam bentuk kekuatan militer, sanksi ekonomi, ataupun instrumen hukum yang bersifat mengikat. Sebaliknya *soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik, bukan paksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan gabungan kebijakan instrumen *hard power* berupa penegakan hukum maritim dan peningkatan patroli serta kebijakan kontrol sumber daya, dan instrumen *soft power* berupa negosiasi teknis bilateral, forum regional, dan kerja sama teknis. Kombinasi ini berhasil mempertahankan prinsip garis pangkal alami dan menyelesaikan sebagian segmen delimitasi, namun beberapa titik masih memerlukan negosiasi lanjutan, dan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat berbentuk penekanan dan penguatan kapasitas teknis pemetaan dan koordinasi antar institusi.

Kata Kunci : Indonesia, Sengketa perbatasan, Singapura, Smart Power



ABSTRACT

Singapore's coastal reclamation from 2015 to 2022 has triggered tensions over Indonesia's maritime sovereignty. This has led to the potential for a shift in the baseline, threatening coastal communities' livelihoods and maritime space, making this issue a matter of national strategic importance for Indonesia. The urgency of this research lies in the need to maintain territorial integrity, maritime legal certainty, and mitigate the environmental and socio-economic impacts of reclamation. This study aims to analyze Indonesia's strategy in resolving border disputes with Singapore from 2015 to 2022. This study uses qualitative methods with descriptive analysis. The concept used in this study is the concept of smart power, which is a combination of hard power and soft power by Joseph S. Nye, Jr. Hard power is the ability of a country to influence other countries through coercion, whether in the form of military force, economic sanctions, or binding legal instruments. Conversely, soft power is the ability of a country to get what it wants through attraction, not coercion. The results of this study show that Indonesia implements a combination of hard power instruments in the form of maritime law enforcement and increased patrols as well as resource control policies, and soft power instruments in the form of bilateral technical negotiations, regional forums, and technical cooperation. This combination has succeeded in maintaining the principle of the natural baseline and resolving some segments of the delimitation, but some points still require further negotiation, and some policy recommendations may take the form of emphasizing and strengthening technical mapping capacity and inter-institutional coordination.

Keywords: *Indonesia, Border disputes, Singapore, Smart power*

